

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis. Indonesia berada diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan diantara dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Dampak dari kondisi tersebut adalah strategisnya Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Namun, dampak buruk dari kondisi geografis Indonesia adalah berbagai bencana nonalam yang dapat terjadi di Indonesia. Dalam kondisi geologisnya, Indonesia berada di daerah bertemunya tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki akomodasi minyak dan gas alam. Namun, hal ini juga yang dapat menimbulkan berbagai bencana alam. Sedangkan berdasarkan kondisi hidrologis, Indonesia memiliki perairan yang baik dimana Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki sumber air seperti sungai dan danau. Namun, bencana alam berupa banjir dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dan pada kondisi demografisnya, Indonesia berada pada peringkat keempat di dunia yang memiliki penduduk paling banyak dengan jumlah 260,580,739 jiwa (Juli 2017).¹

Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang strategis, provinsi maupun daerah-daerah di Indonesia juga mendapatkan keuntungan serta kerugian. Salah satu provinsi yang berpengaruh di Indonesia, Kalimantan Timur, merupakan provinsi yang dilewati jalur khatulistiwa. Kalimantan Timur terletak di wilayah dengann koordinat antara 4°24'LU - 2°25'S

¹ CIA.gov, *The World Factbook*,
<https://www.cia.gov/library/publikations/resources/the-world-factbook/geos/id.html>, diakses pada 17 Oktober 2017.

dan 113°44' - 119°00'BT dan memiliki luas wilayah 127.267,52 km². Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat Nopember-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi dan rendahnya daerah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu pada tahun 2014 berkisar antara 20,0° C pada bulan Maret sampai 36,2° C pada bulan September dan Oktober dan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.²

Berdasarkan aspek wilayah Kalimantan Timur, terdapat berbagai jenis bencana yang sering terjadi di Kalimantan Timur yaitu bencana sosial dan bencana alam. Dalam peristiwa bencana sosial, dengan berbagai macam suku dan ras yang berada di Kalimantan Timur dapat menyebabkan berbagai konflik. Perselisihan antar suku sudah mereda dan tidak ada lagi perseteruan antar suku yang memakan banyak korban jiwa. Selain bencana sosial yang sudah mereda di Kalimantan Timur, bencana lain yang kerap terjadi yaitu bencana alam.

Pada umumnya, istilah bencana lebih erat kaitannya dengan peristiwa yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Kejadian gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan

² Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. *Kalimantan Timur Dalam Angka (Kalimantan Timur in Figures) 2015*.

serentetan kejadian alam lainnya membawa ancaman hilangnya harta benda, jatuhnya korban luka hingga korban jiwa. Belum lagi, kejadian ini juga dapat berdampak bagi kondisi psikologis dan ekonomi bagi para korbannya.

Walaupun keberadaan Kalimantan Timur tidak memungkinkan provinsi tersebut untuk dilanda bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami, namun dari kondisi iklim yang dimilikinya menjadikan Kalimantan Timur wilayah yang rawan terjadi bencana alam terutama banjir dan kebakaran hutan. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya bencana alam di Kalimantan Timur. Bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-faktor kejadian alam maupun oleh ulah manusia.

Bencana banjir bandang terjadi pada tahun 1998 kemudian terjadi pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2017 sehingga bencana banjir tersebut disebut sebagai bencana yang terjadi dalam siklus 10 tahunan.³ Kejadian bencana alam banjir terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur juga termasuk dalam wilayah yang rawan. Bencana banjir yang terjadi pada beberapa tahun terakhir lebih banyak yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara serampangan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah sungai dan kurangnya sarana penyerapan air hujan yang turun.⁴ Dampak dari terjadinya bencana banjir adalah menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa harta dan korban jiwa serta masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan dengan normal. Selain itu, bencana juga menghambat pembangunan daerah

³ Christopher D. *Banjir Besar di Samarinda Siklus 10 Tahunan*. Diunduh pada 7 April 2017 19:02 WIB. Tersedia di <http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/07/banjir-besar-di-samarinda-siklus-10-tahunan>, diakses pada 4 November 2017 pukul 12.00 WIB

⁴ Lany Erinda Ramdhan, *Banjir Sebagai Dampak Deforestasi di Kal-Tim*, hal. 1.

karena pemerintah perlu mengganti rugi materi atas dampak bencana yang terjadi serta menghambat kegiatan pembangunan yang sedang terjadi di Kalimantan Timur.

Dikarenakan faktor-faktor penyebab banjir saling bersangkutan satu sama lain, maka untuk menanggulangi permasalahan banjir ini lebih baik dijalankan secara komprehensif. Maka, penyebab bencana banjir tersebut harus ditangani secara keseluruhan agar bencana banjir tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas, karena jika penyelesaian hanya dilakukan dengan mengatasi salah satu faktor saja, maka bencana banjir tidak akan selesai dengan tuntas secara keseluruhan.

Permasalahan besar mengapa terjadi bencana adalah hilangnya sebagian besar kawasan di daerah sungai di Kalimantan yang merupakan daerah serapan air. Penyebab dari hilangnya daerah serapan air ini adalah adanya *illegal logging*, *illegal mining*, tidak adanya sistem tatanan kehutanan yang baik, dan pengeksploitasian sumber daya alam dan mineral secara besar-besaran. Dari beberapa penyebab yang diuraikan ini, salah satu penyebab yang memiliki kontribusi pada kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan.

Kebakaran hutan menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Indonesia bagi kelangsungan ekosistem kehutanan, karena selain berpengaruh pada bencana alam yang dapat terjadi di daerah dimana terletaknya hutan tersebut, namun dampak lain juga bisa dirasakan oleh banyak negara dengan peran hutan sebagai paru-paru dunia.⁵ Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur disebabkan oleh adanya perusahaan-perusahaan serta masyarakat sekitar yang berada di Kalimantan Timur yang membakar hutan secara sengaja demi kepentingan pribadi. Walaupun pendapatan yang

⁵ Ibid.

didapatkan Kalimantan Timur dari perusahaan-perusahaan yang berada merupakan salah satu pendapatan yang berkontribusi banyak terhadap perkembangan ekonomi daerah, namun perusahaan-perusahaan tersebut telah merusak lingkungan Kalimantan Timur secara bersamaan. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan lebih memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan-perusahaan. Kebakaran hutan dapat berdampak pada aspek kehidupan seluruh masyarakat dunia maka perlu adanya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan yang tepat dan efektif.

Kalimantan Timur telah melakukan banyak upaya untuk menanggulangi bencana yang terjadi dengan penanggulangan secara domestik. Kalimantan Timur telah memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Jepang dan Australia dalam sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur mampu bekerjasama dengan negara lain namun belum dalam penanggulangan bencana alam.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di dunia diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian bencana alam di daerah. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur sebagai badan yang bekerja untuk menanggulangi permasalahan bencana alam, masih belum dapat menyelesaikan permasalahan bencana alam di Kalimantan Timur secara tuntas dengan keterbatasan anggaran dan personel yang dimiliki oleh BPBD Kalimantan Timur.⁶

⁶ Tempo.co. *Banjir Samarinda, Anggaran dan Personel BPBD Minim*. Diunduh pada 5 Juni 2017 08:14 WIB. Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/881472/banjir-samarinda-anggaran-dan-personel-bpbd-minim>, diakses pada 8 November 2017 pukul 17.00 WIB

Dalam era globalisasi, kasus bencana alam yang terjadi di daerah dapat menjadi sarana hubungan internasional dimana kasus tersebut mampu melibatkan aktor internasional dalam penyelesaiannya dan dapat mempererat hubungan antar negara. Bencana alam dapat menjadi sarana diplomasi yang membangun hubungan bilateral antar negara maupun hubungan multilateral menjadi semakin kuat selain dari tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan bencana alam itu sendiri.⁷ Kalimantan Timur mengharapkan hubungan diplomatik Indonesia mampu menjadi sarana penyelesaian bencana alam di daerah. Selain kerjasama bilateral maupun multilateral dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, bencana alam dapat menjadi nilai positif bagi negara untuk mempererat hubungan internasional. Oleh karena itu, akan diulas topik praktik diplomasi bencana alam yang terjadi di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dengan judul “PERAN DIPLOMASI BENCANA DALAM PRAKTEK DIPLOMASI (Studi Kasus: Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk Mengatasi Bencana Alam)”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, dapat diambil rumusan masalah yaitu, “Bagaimana implementasi paradiplomasi Pemerintah Kalimantan Timur untuk mengatasi bencana alam?”

⁷ Takdir Ali Mukti, *PARADIPLOMACY: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013) hal. 4-5.

C. Kerangka Teoritik

1. Konsep Paradiplomasi

Istilah baru dari adanya hubungan pemerintah dalam hubungan internasional menjadi kajian yang telah diteliti oleh banyak akademisi. Kemampuan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri ini disebut dengan istilah '*paradiplomacy*' dengan arti gabungan dari kata *parallel* dan *diplomacy* yang ditemukan oleh Panayotis Soldatos (1980-an).⁸ Paradiplomasi merupakan perilaku dan kapasitas oleh entitas 'sub-state' maupun pemerintah daerah dalam hubungan kerjasama dengan pihak asing.⁹ Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek adalah *micro-diplomacy*.¹⁰

Baerdasarkan dalam studi hubungan internasional modern, negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara negara. Aktor-aktor lain seperti perusahaan internasional, lembaga internasional, pemerintah daerah serta individu mampu menjadi aktor dalam dunia global. Perubahan aktor-aktor ini perlu dipahami dengan benar agar dapat digambarkan dengan jelas sesuai situasi yang ada pada hubungan internasional.¹¹ Sehingga diplomasi yang sebelumnya terlihat kaku karena menggunakan prinsip bahwa kegiatan negosiasi hanya dilakukan oleh pemerintah negara-negara dan sekarang adanya perubahan dalam bentuk kebebasan dalam bentuk berdiplomasi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki luas sepanjang 3.977 mil dengan jumlah pulau sebanyak 17.508

⁸ Ibid.

⁹ Loc. Cit., hal. 2.

¹⁰ Alexander S. Kuznetsov, Op. Cit., hal. 27.

¹¹ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs* (London & New York: Routledge, 2015), hal. 1

memiliki kekhawatiran dalam tata kelola pemerintahannya. Oleh karena itu, tiap daerah memiliki otonomi masing-masing dalam bidang yang telah disepakati. Otonomi diberikan sebagai bentuk pemindahan hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah namun dengan Undang-Undang Dasar Negara sebagai landasan utama dalam menentukan kewajiban. Berdasarkan otonomi daerah yang dimiliki untuk menentukan kewajiban juga menjadi dampak dari munculnya aktor baru dalam dunia internasional.

Pada era globalisasi, kuatnya arus globalisasi menyebabkan aktor hubungan internasional melibatkan semua aspek sosial bahkan individu. Dalam kasus ini, dimana Kalimantan Timur memiliki struktur pemerintahan yang memiliki otoritas dan memiliki hak dalam melakukan kerjasama internasional demi kepentingannya. Dalam uraian pengertian serta klasifikasi dari paradiplomasi diatas maka pemerintah sub-nasional mampu memiliki hubungan dengan aktor internasional secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan melibatkan aktor luar negeri. Dalam praktik paradiplomasi, hubungan luar negeri dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang spesifik. Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki hak otonomi daerah maka Kalimantan Timur dapat melaksanakan hubungan luar negeri dengan pihak asing dengan tujuan mencapai kepentingannya tanpa melalui pemerintah pusat.

2. Konsep Diplomasi Bencana

Bencana merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bencana biasanya terjadi secara mendadak dan tidak dapat diperkirakan secara akurat sehingga menyebabkan dampak yang buruk berupa kecelakaan fisik maupun kerugian materi. Bencana dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan pengertiannya yaitu, definisi bencana alam adalah, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”, dan definisi bencana nonalam adalah,” Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. “, sedangkan definisi dari bencana sosial adalah, “Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. “¹² Dari ketiga jenis bencana tersebut, bencana alam merupakan bencana yang menjadi kekhawatiran tersendiri dengan letak geografis yang dimiliki Indonesia. Bencana alam menjadi kekhawatiran karena dapat menyebabkan kerugian dan menghambat pembangunan negara.

Diplomasi sendiri memiliki konteks yang luas dalam diplomasi bencana alam. Dalam diplomasi bencana alam konteks yang harus ditangani adalah hubungan internasional, konflik serta perdamaian. Oleh karena itu, diplomasi yang dimaksud dalam diplomasi bencana alam bukan hanyalah hubungan bilateral maupun multilateral dengan perwakilan tiap pemerintah negara dan badan-badan terkait dengan pemerintahan yang terlibat dalam kepentingan politik, namun juga beberapa aktor lain dalam hubungan internasional yaitu negara berdaulat, organisasi internasional, kelompok non-profit, perusahaan-perusahaan, maupun wilayah yang tidak berdaulat.¹³

Bencana alam dapat menjadi sarana diplomasi yang digunakan dalam hubungan internasional. Dalam diplomasi

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹³ Ilan Kelman, *Disaster Diplomacy: How disasters affect peace and conflict* (London & New York: Routledge, 2012), hal. 3.

bencana, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain.¹⁴ Segala bentuk kerjasama terlibat dalam kegiatan bencana terdiri dari kegiatan sebelum bencana seperti pencegahan, perencanaan, kesiagaan, dan pengurangan resiko akan terjadinya bencana. Kemudian termasuk juga dalam kegiatan kebencanaan berupa investigasi, kebijakan, pelatihan dan lainnya. Selain itu kegiatan setelah terjadinya bencana berupa reaksi, bantuan, rekonstruksi, dan pemulihan.

Menurut Ilan Kelman (2012), diplomasi bencana alam menjadi pembahasan tentang bagaimana dan mengapa aktivitas yang terlibat dengan bencana alam mengurangi atau tidak mengurangi konflik dan menimbulkan kooperasi, baik sebelum terjadinya bencana alam maupun setelah terjadinya bencana alam.¹⁵ ¹⁶ Berdasarkan buku Ilan Kelman tentang *Diplomasi Bencana*, terdapat tiga jalur yaitu *government-led*, *organisation-led*, dan *people-led*. Namun, pengelompokan jalur diplomasi bencana tersebut disederhanakan oleh Davidson dan Montville menjadi dua jalur diplomasi bencana yaitu jalur formal dan jalur non formal. Jalur formal adalah jalur diplomasi bencana yang termasuk dalam interaksi antara politisi, diplomat, dan pemerintahan. Kemudian jalur non formal atau jalur tak terstruktur adalah jalur yang dilakukan dalam interaksi ilmiah, pertukaran budaya, dan kunjungan individu non politik. Sesuai dengan kedua jalur ini, maka jalur yang sesuai dengan Ilan Kelman yaitu *government-led* termasuk dalam jalur formal dikarenakan adanya interaksi antara pemerintah, sedangkan jalur *organisation-led* dan

¹⁴ Ratih Herningtyas, Surwandono, *Diplomasi Bencana: Sejarah, Peluang dan Kerjasama Internasional*, (Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional UMY, Magister Ilmu Hubungan Internasional UMY), hal. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 4

¹⁶ Ratih Herningtyas – Surwandono, “Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional” dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 3 No.2 Tahun 2014, hal. 3.

people-led termasuk dalam jalur non formal karena merupakan interaksi antara masyarakat dan organisasi yang bersifat non politik.

Jalur formal merupakan jalur diplomasi bencana yang menggunakan interaksi yang dilakukan oleh politisi, diplomat, dan pemerintahan. Diplomasi bencana yang melalui jalur formal ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan diplomasi bencana secara resmi. Salah satu jenis jalur formal adalah jalur *government-led* dimana adanya interaksi diplomasi bencana yang dipimpin oleh pemerintahan. Sedangkan jalur non formal adalah jalur tak terstruktur yang mencakup interaksi ilmiah, pertukaran budaya, dan kunjungan individu non politik. Dengan penjelasan tersebut, interaksi *organisation-led* dan *people-led* termasuk dalam jalur non formal dikarenakan termasuk dalam jalur yang terjadi secara non politik. Interaksi oleh *people-led* dan *organisation-led* tersebut dalam jalur non formal atau jalur yang tak berstruktur dilakukan dengan tanpa adanya perjanjian resmi dengan Pemerintah. Karena tidak ada perjanjian resmi dengan pemerintah maka hubungan yang terjalin antar aktor diplomasi bencana disebut tidak terstruktur karena tidak adanya MoU yang terjalin diantara aktor diplomasi bencana tersebut.

Dalam kasus bencana alam yang terjadi di Kalimantan Timur, bencana alam yang sering terjadi dan terus menjadi kekhawatiran adalah bencana alam banjir. Implementasi konsep diplomasi bencana menurut Ilan Kelman dalam kasus bencana banjir di Kalimantan Timur adalah untuk mengetahui apakah bencana alam banjir yang terjadi di Kalimantan Timur tersebut dapat menjadi sarana yang mempererat hubungan diplomatik dan mampu tidaknya mengurangi konflik dan menimbulkan kooperasi baik dalam aktivitas sebelum terjadinya bencana alam maupun aktivitas setelah terjadinya bencana alam. Menurut Kelman, beberapa bencana alam terjadi dengan campur tangan manusia. Bencana alam memang sejatinya terjadi secara mendadak karena diakibatkan

oleh alam, seperti banjir dan erupsi. Namun keputusan manusia terhadap harta dan manusia lainnya secara merugikan tanpa perhitungan yang mencakup tentang lingkungan disekitar mereka tinggal.¹⁷ Oleh karena itu, penyelesaian bencana alam banjir di Kalimantan Timur menggunakan diplomasi bencana alam untuk mengetahui apakah hubungan internasional mampu menyelesaikan pada daerah yang membutuhkan penanganan bencana alam secara lebih.

Diplomasi bencana yang digunakan oleh Kalimantan Timur adalah menggunakan jalur formal dan jalur non formal dalam teori Ilan Kelman. Kalimantan Timur bekerjasama dengan Australia dan Jepang sebagai mitra untuk penanggulangan bencana. Kerjasama yang dilakukan oleh Kalimantan Timur dengan Australia yaitu menggunakan jalur formal dan juga jalur non formal. Jalur formal yang untuk penanggulangan bencana Kalimantan Timur melalui *government-led*. Kalimantan Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Australia melalui *Australian Volunteers International (AVI)* dengan disahkan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*. Maka dari itu kerjasama ini termasuk dalam jalur formal karena kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama resmi yang disahkan oleh pemerintah melalui MoU.

Selain itu, Kalimantan Timur juga bekerjasama dengan Australia dalam penanggulangan bencana menggunakan jalur non formal melalui interkasi *people-led*. Penanggulangan bencana dengan jalur non formal melalui interaksi *people-led* ini dikarenakan adanya interaksi yang terjadi antara AVI dengan masyarakat Kalimantan Timur. Keikutsertaan AVI dalam memberi bantuan penanggulangan bencana dan pembenahan lingkungan merupakan kegiatan yang terjadi dengan masyarakat sehingga tidak dilakukan

¹⁷ Ilan Kelman, Op. Cit., hal. 11.

melalui MoU. Maka dari itu, kerjasama ini termasuk menggunakan jalur non formal.

Kerjasama non formal lain yang dilakukan Kalimantan Timur adalah dengan NGO Jepang. NGO Jepang berupa *Forestry and Forest Products Research Institute* (FFPRI), NEC, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), dan juga Tokyo University bekerjasama dengan Universitas Mulawarman untuk penanggulangan bencana di Kalimantan Timur. Dengan menggunakan latar belakang penelitian ilmiah sebagai perjanjian kerjasama dalam penanggulangan bencana maka kerjasama ini termasuk dalam diplomasi bencana menggunakan jalur non formal.

Oleh karena itu, Kalimantan Timur mengaplikasikan diplomasi bencana sebagai sarana penanggulangan bencana dengan mengaplikasikan jalur formal dan jalur non formal dalam penyelesaiannya.

D. Hipotesa

Implementasi paradiplomasi Pemerintah Kalimantan Timur untuk mengatasi bencana alam yaitu dengan;

1. Melakukan diplomasi bencana melalui jalur formal dan non formal dengan Australia.
2. Melakukan diplomasi bencana melalui jalur non formal dengan NGO Jepang.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi serta pengetahuan tentang:

1. Sejarah bencana alam Kalimantan Timur

2. Potensi kerjasama internasional dalam menanggulangi bencana alam di Kalimantan Timur
3. Kebijakan yang dibuat untuk kerjasama internasional di Kalimantan Timur

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif. Tujuan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah dengan menjelaskan dan menggambarkan fakta-fakta kerjasama pemerintah Kalimantan Timur dalam penyelesaian bencana banjir melalui diplomasi bencana alam.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sedangkan jangkauan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam kurun waktu sejak 2015 ketika Kalimantan Timur mulai melakukan kerjasama dengan Australia untuk penanggulangan bencana hingga 2017 ketika terjadi lagi banjir bandang di Kalimantan Timur.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan bentuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif, maka perlu adanya penelitian ini mendapatkan informasi-informasi dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh informasi melalui pustaka yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Literatur yang ditelaah oleh penulis yaitu buku-buku, dokumen, jurnal, artikel, maupun halaman-halaman internet yang memuat tentang pembahasan dalam

penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data perihal pembahasan dalam penelitian ini. Maka, dengan kebutuhan untuk memiliki sumber yang valid penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Kalimantan Timur memiliki *website* resmi untuk berita-berita dan informasi tentang seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam *website* tersebut terdapat halaman untuk mengunggah dokumen seputar Kalimantan Timur yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terdapat di dalamnya berupa peta Kalimantan Timur, sejarah maupun kondisi Kalimantan Timur. Kebanyakan informasi tentang Kalimantan Timur diambil dari dokumen tersebut. Selain dari RKPD, data-data yang didapatkan tentang Kalimantan Timur juga didapatkan melalui surat kabar online dan jurnal-jurnal. Sedangkan untuk dokumen yang berkaitan dengan teori dan konsep serta pernyataan para akademisi terdapat dalam bentuk jurnal, buku-buku, artikel-artikel, serta buku catatan pribadi.

b. Wawancara

Wawancara memerlukan seseorang yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian untuk dijadikan informan yang mampu member informasi yang valid karena penelitian memerlukan orang yang berkompeten dan sudah sangat mengetahui permasalahan yang terdapat pada penelitian ini untuk menjadi seorang informan. Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah terpilihnya informan yang valid, maka proses wawancara dilakukan melalui aplikasi *chatting* serta dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Informan yang dilibatkan dalam

penelitian ini adalah orang yang memiliki wewenang bekerja sama dengan pihak luar negeri di BPBD bernama Hj. Zaina Yurda yang bekerja sebagai Sekretaris BPBD dan telah mengambil alih hubungan kerjasama di BPBD. Informan ini telah dipercayai oleh pemerintah Kalimantan Timur untuk menangani perihal permasalahan bencana alam daerah. sehingga sudah bekerja sama secara langsung dengan pemerintah Kalimantan Timur. Dengan terlibatnya informan yang berhubungan langsung dengan sistem pemerintahan dan permasalahan di Kalimantan Timur maka validitas dari informasi yang didapatkan sudah pasti.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab:

BAB Pertama (BAB I) adalah pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Rencana Sistematika Penelitian.

BAB Kedua (BAB II) akan menjelaskan tentang dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Kalimantan Timur.

BAB Ketiga (BAB III) akan menggambarkan tentang dinamika peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia dan sistem penanggulangan bencana di Kalimantan Timur.

BAB Keempat (BAB IV) akan berisikan tentang penjelasan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam kerjasama internasional untuk penanggulangan bencana.

BAB Kelima (BAB V) akan berisi kesimpulan dari seluruh BAB yang telah ditulis dan juga sebagai tanda akhir dari karya tulis ini.